



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANI SRIYANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 756040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **9.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4400 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah Seluas 2782 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 310 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **150.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSK JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **50.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.631.194
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.004.631.194
III. HUTANG	Rp.	271.964.245
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.732.666.949

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.